

SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SUNGAI UNGAR KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Oleh :

SRI HARTATI
NIM : 10675005169

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2010**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SUNGAI UNGAR KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN

Oleh : Sri Hartati

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi, karena salah satu tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk mewujudkan demokrasi tingkat desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, disamping itu BPD mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya, kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemui di lapangan dan disajikan dalam bentuk uraian tabel-tabel. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sungai Ungar yang berjumlah 3090 jiwa, sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 108 orang yang terdiri dari pengurus BPD 11 orang dan masyarakat sebanyak 97 orang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun berada dalam kategori kurang baik, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun adalah : kurang dana, sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi yang disebabkan oleh kesibukan aktivitas masing-masing anggota BPD, dan kurangnya peran masyarakat untuk hadir dan aktif dalam memberikan idea tau gagasan dan pendapat dalam kegiatan rapat.

Kata Kunci : Fungsi, Mengayomi, Legislasi, Pengawasan, Menampung dan Menyalur aspirasi, BPD.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.....	Latar
Belakang.....	1
1.2Perumusan Masalah	10
1.3Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
.BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Desa.....	14
2.2 Otonomi Desa	17
2.3 Badan Permusyawaratan Desa	18
2.4 Pelaksanaan fungsi	19
2.5 Konsep Operasional	22
2.6 Hipotesa	24
2.7 Tehnik Pengukuran data.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.2 Populasi dan Sampel	27
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Tehnik Analisa Data.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Keadaan Geografis	32
4.2 Keadaan Penduduk.....	33
4.3 Keadaan Insfrastruktur Desa	39
4.3.1 Sarana Pendidikan	39

4.3.2 Sarana Ibadah	39
4.3.3 Sarana Kesehatan.....	40
4.3.4 Sarana Transportasi	41
4.4 Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Ungar	42
4.5 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (PD) Sungai Ungar.....	51

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden	54
5.1.1 Keadaan Responden Berdasarkan Umur	54
5.1.2 Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
5.1.3 Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .	56
5.1.4 Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	57
5.2 Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun	58
5.2.1 Mengayomi Adat Istiadat.....	59
5.2.2 Legislasi.....	66
5.2.3 Pengawasan.....	72
5.2.4 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.....	78
5.3 Hambatan-hambatan didalam Menjalankan Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.....	87
5.3.1 Faktor Intern	88
5.3.2 Faktor Ekstern	90

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	91
6.2 Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dengan memberikan keleluasaan dan juga peluang bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Makna yang paling mendasar dari Otonomi Daerah adalah adanya kewenangan yang luas pada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, menurut prakarsa dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat. Dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur undang-undang” (1999:11).

Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan politik desentralisasi memunculkan berbagai tuntutan perubahan yang mengarah pada terciptanya masyarakat adil dan sejahtera. Puncak tuntutan terhadap perubahan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah adalah keinginan supaya dijalankan politik desentralisasi. Otonomi daerah menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keseragaman daerah.

Otonomi daerah merupakan sebuah konsep yang sudah begitu lama tidak muncul kepermukaan lantaran tenggelam oleh kokohnya kekuatan pemerintahan pusat pada masa lalu, Otonomi Daerah tenggelam oleh kecenderungan sentralisasi rezim yang berkuasa dengan dalih pembangunan nasional. Pada hakekatnya Otonomi Daerah merupakan suatu konsep yang sesungguhnya sudah muncul sekian lama, akan tetapi belum bisa diwujudkan secara nyata.

Secara nyata, tuntutan tersebut tercapai dengan keluarnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan secara substansial undang-undang ini memberikan kewenangan otonomi yang luas kepada daerah secara proporsional. Hal ini terlibat pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah untuk melaksanakan aspirasi masyarakat daerah lebih mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun bila ditelusuri lebih dalam, hikmah positif yang dirasakan di era reformasi pada proses pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam wujud Otonomi Daerah ini adalah kembali diberikannya hak asal-usul dan diakuinya potensi serta keanekaragaman daerah. Hal ini diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-undang terdahulu yaitu Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Suatu perubahan yang sangat penting dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, adalah pemisahan antara

kekuasaan Eksekutif Desa (Pemerintah Desa) dengan kekuasaan Legislatif (Badan Permusyawaratan Desa). Dengan pemisahan ini membawa implikasi yang luas yakni kekuasaan mulai dibagi dan kepala desa tidak lagi sebagai pusat kebijakan seperti masa lalu. Dengan paradigma baru ini kekuasaan eksekutif harus bersedia di kontrol oleh legislatif. Pada posisi lain masyarakat memiliki saluran formal yang mungkin dapat diandalkan untuk memperjuangkan aspirasi mereka melalui lembaga baru tersebut.

Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masyarakat daerah menaruh harapan besar terhadap Implementasi Otonomi Daerah, tidak terkecuali masyarakat ditingkat desa. Kehadiran Otonomi Daerah bagi setiap warga di desa memberikan dinamika dan suasana baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa. Sebab masyarakat desa sangat sadar bahwa keberadaan institusi-institusi demokrasi desa selama ini berada dalam posisi yang sangat kondusif dalam mendorong penegakan pada masyarakat.

Adapun urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 206 mencakup:

1. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak usul desa.
2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah Kabupaten atau Kota.

4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Di dalam UU No.32 Tahun 2004 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif bahkan tidak lagi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.

Adanya Otonomi Daerah melalui UU No. 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah bukan hanya menyangkut perubahan sistem dan struktur Pemerintahan Daerah, melainkan juga manajemen Pemerintahan Daerah terutama menyangkut kesiapan, ketersediaan dan teknik menggerakkan sumber daya aparatur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan yang kuat, efektif, efisien, dan memiliki akuntabilitas.

Konsekuensi implementasi dari Otonomi Daerah, salah satu perubahan yang fundamental adalah terjadinya pergeseran struktur organisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diharapkan mampu memberikan dinamika dan suasana yang lebih demokratis, otonom, independen dalam pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dampak khusus diharapkan agar terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang jauh lebih berdaya dan dapat menegakkan Otonomi Daerah. Agar lebih efektif dan efisien mekanisme pengawasan terhadap Pemerintahan

Desa, maka dibentuklah suatu Badan/organisasi yang dinamakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selanjutnya dijelaskan dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tertera jelas bahwa keberadaan lembaga legislatif desa memiliki kedudukan, wewenang, hak dan fungsi yang sangat berbeda di bandingkan masa lalu. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat di desa merupakan wahana yang melaksanakan demokrasi. Bahkan secara substensif BPD memiliki otoritas politik yang sangat kuat, otonom, dan independen dalam menjalankan fungsinya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga desa yang dibentuk di tiap-tiap desa diseluruh Indonesia yang pembentukannya dilatar belakangi oleh Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD dengan pemerintah desa.

Arti penting dan prospektif pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah:

1. Kehadirannya merupakan wahana bagi kehidupan demokrasi di Desa.
2. Sebagai jawaban konkrit terhadap ketidakberdayaan dan kelumpuhan institusi-institusi demokrasi formal di pedesaan.

3. Mendorong terciptanya proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, kesetaraan dalam pelayanan, partisipasi masyarakat, konstitusional berjalan diatas aturan yang ada dan dihindari kemungkinan desa sentris, kerja sama, serta musyawarah dalam pengambilan keputusan.
4. Berkurangnya monopoli keputusan politik yang selama ini sentralistik.
5. Menimbulkan kesadaran baru kepada warga desa akan hak-hak dan tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Oleh karena itu, di level desa perlu dibangun good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa yang direpresentasikan melalui kelembagaan BPD dalam setiap urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan kepentingan desa. Tentunya ini dapat terwujud apabila BPD memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat tidak hanya terhadap pemerintah desa tetapi juga terhadap pemerintah supra desa.

Lahirnya BPD memberikan peluang dan harapan untuk terciptanya demokrasi. Sebagai badan perwakilan di Desa BPD memiliki fungsi yang harus dilaksanakan sebagai parlemen desa (*Village Council*) yaitu merupakan sekelompok aktifitas yang harus mereka jalankan dengan baik.

BPD yang beranggotakan pemuka masyarakat di desa dibentuk untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa, serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi masyarakat ditingkat desa.

Menurut pasal 209 Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Sedangkan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun tata tertib BPD

Pengertiannya diatas menegaskan bahwa bagaimanapun lembaga Permusyawaratan Rakyat Desa itu harus menjadi cermin masyarakat yang diwakilinya dalam membuat suatu kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak (rakyat), sehingga untuk dapat memenuhi keinginan tersebut BPD harus melakukan komunikasi dengan masyarakat guna mencari masukan dalam proses perumusan suatu kebijaksanaan atau peraturan. Hal ini dimungkinkan dalam rangka mencari serta menggali apa yang menjadi keinginan dari masyarakat Desa.

Jadi, dalam hal ini pengikutsertaan masyarakat untuk turut bertanggung jawab didalam pemerintahan diwujudkan dengan adanya lembaga BPD yang menjalankan fungsi legislatif, tugas kontrol dan pengawasan dan pelaksanaan tugas Kepala Desa (eksekutif) dalam melaksanakan tugasnya. Melalui fungsinya sebagai legislatif itulah BPD mengemban tugas sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat. Artinya, dalam melahirkan kebijaksanaan, BPD harus berlandaskan kepada kepentingan bersama atau untuk seluruh rakyat yang diwakilinya.

Namun perkembangan yang terjadi di Desa Sungai Ungar tidaklah seperti yang diharapkan, karena BPD yang layaknya berperan sebagai lembaga demokrasi di Desa belum melaksanakan fungsinya dengan baik seperti yang dicita-citakan, kemudian dari beberapa fungsi yang dimiliki BPD belum dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan harapan masyarakat.

Sebagaimana yang terdapat pada desa-desa lain, maka di Desa Sungai Ungar yang merupakan satu desa yang terdapat di Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, juga memiliki BPD. Dilihat dari segi administrasi, lembaga ini selain strukturnya telah diisi berdasarkan petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan, juga penetapan tugas di masing-masing bagian telah dijelaskan. Pelaksanaan fungsi dari BPD yang mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan, namun dalam pelaksanaannya pelaksanaan fungsi legislasi dari BPD Desa Sungai Ungar ini, belum dilaksanakan secara efektif.

BPD sebagai badan legislasi Desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan.

Peran BPD dan Pemerintah Desa sangat penting, salah satunya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa.

Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datangnya dari anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. Rancangan yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan dari anggota BPD, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari BPD maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan

bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa.

BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat belum dapat berperan secara maksimal, masalah ini dialami oleh desa-desa lain, begitupun dengan kondisi BPD J yang sering mengungkapkan permasalahan tentang kesejahteraan anggotanya dan belum menyangkut tentang permasalahan yang dialami warga sekitar. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan dalam pembuatan Peraturan Desa, karena sebelum Peraturan Desa ditetapkan harus disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang sebenarnya tentang **“Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun”**.

1.2 Perumusan Masalah

Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah organisasi yang berfungsi sebagai lembaga yang mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan desa dan merupakan wahana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka mewujudkan demokrasi dan Otonomi Desa.

Kemampuan Badan Permusyawaratan Desa melakukan pemahaman tugas, wewenang, dan fungsinya dalam menampung, menyalurkan aspirasi dan kepentingan dari masyarakat yang diwakilinya serta pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan desa merupakan salah satu ukuran atas pelaksanaan tugas pokok sebagai wakil masyarakat.

Permasalahannya adalah selama ini BPD belum menunjukkan peran yang berarti dan belum dengan baik, BPD belum membawa makna yang sangat berarti dan belum memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka dari permasalahan yang ada diatas dan ditambah lagi sebagaimana yang telah penulis kemukakan dilatar belakang penelitian ini maka dapat dirumuskan suatu permasalahan pokok penelitian ini adalah: **“Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun?”**.

I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Ungar.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Ungar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pikiran bagi pihak yang berkepentingan dan bahan perbandingan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- b. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengambil kebijakan untuk diterapkan ditengah-tengah kehidupan, terutama bagi pihak BPD di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun sehubungan peranannya sebagai wakil aspirasi masyarakat.
- c. Bagi penulis sendiri adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta untuk pengembangan pemikiran tentang permasalahan yang diteliti.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran umum yang sistematis terhadap skripsi ini, maka disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang melandasi pembahasan skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis menjelaskan sejarah singkat Desa Sungai Ungar, keadaan geografis Desa Sungai Ungar, keadaan demografi, dan struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas hasil dari penulisan dan pembahasan yang dilakukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian-penelitian yang relevan dengan variable yang diteliti (Sugiono: 2005: 63). Dalam setiap penelitian telaah pustaka digunakan untuk memberi landasan dasar berpijak yang dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah. Telaah pustaka dimaksud untuk memberikan gambaran dan batasan tentang teori-teori yang dijadikan pedoman atau landasan penelitian yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan penulis akan menjelaskan telaah pustakanya dibawah ini.

2.1 Desa

Lahirnya perkembangan politik ditingkat lokal (desa) yang merupakan organisasi formal diharapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih demokratis, otonom, independen, dan sekaligus prospektif dalam pengembangan demokrasi ditingkat desa.

Komunitas desa merupakan bagian integral dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selain sebagai tempat tinggal masyarakatnya sekaligus sebagai wadah terselenggaranya kekuasaan yang merupakan berlangsungnya pemerintahan yang berdasarkan hak istimewanya yaitu

adat istiadat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nilai-nilai adat inilah yang menjadi landasan bagi Otonomi Daerah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada dalam wilayah Kabupaten.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan definisi desa berdasarkan PERDA Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masih dalam PERDA Karimun No.13 Tahun 2007 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang terdapat dalam pasal 206 UU. Tahun 2004, antara lain mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintah lainnya yang diolah oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sedangkan bentuk dan susunan Pemerintahan Desa menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999, pasal 8 ayat 2 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa adalah.

1. Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan Pemerintahan Desa
2. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretaris Desa dan Tata Usaha.
 - b. Unsur pelaksana, yaitu pelaksanaan-pelaksanaan teknis di lapangan, seperti unsur pamong tani.
 - c. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.

Jadi dapat ditarik kesimpulan pengertian desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang

berada dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat setempat.

2.2 Otonomi Desa

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian Desa masih berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian otonomi desa adalah kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan sosial budaya masyarakat setempat.

Sedangkan menurut **HAW. Widjaja (2003: 165)** Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.

Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Jadi penulis menyimpulkan pengertian Otonomi Desa adalah kewenangan suatu desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah pusat didalamnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan Peraturan Perundang-undangan.

2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan. Sebagai badan permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan BPD juga berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD dikuatkan oleh Surat Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada pasal 1 poin d menjelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Dari prospektif politik BPD memiliki otoritas politik yang sangat kuat, otonom, dan independen dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi legislasi.

Selanjutnya dijelaskan dalam PERDA Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007 pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Badan Permusyawaratan Desa tersebut merupakan perubahan dari Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa tersebut membawa konsekuensi yaitu bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut tidak lagi dipilih dan tidak lagi berwenang meminta pertanggung jawaban Kepala Desa, akan tetapi hanya berwenang meminta Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Desa dan tidak lagi dalam kapasitas menerima ataupun menolak LKPD Kepala Desa tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan yang berkedudukan sejajar dengan pemerintah desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.4 Pelaksanaan Fungsi

Pelaksanaan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,

serta fungsi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya pelaksanaan fungsi legislasi dari BPD

Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan yang merupakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau organisasi (**Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke III 2002: 1215**).

Fungsi adalah kegunaan suatu hal tentang jabatan atau kedudukan yang faal (kerja suatu bagian organisasi) (**Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke III 2002: 1215**).

Adapun dalam hal tata kerja adalah merupakan cara-cara pelaksanaan kerja yang efisien mungkin mengenai suatu fungsi dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga, waktu, ruang, dan biaya yang tidak tersedia (**Boediono, 2001: 62**).

Moekijat (1991: 12) pelaksanaan tugas dan fungsi adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada atau mengaturnya.

Menurut pendapat **Moch As Ad (2000: 65)** tentang pelaksanaan tugas dan fungsi adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan bersangkutan. Untuk menilai pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara umum dapat dibagi menjadi:

1. Kualitas pelayanan
2. Kuantitas pelayanan
3. Waktu pekerjaan

4. Jabatan yang dipegang
5. Absensi kerja
6. Keselamatan dalam menjalankan pekerjaan

Quibble (2001: 4) tentang pelaksanaan fungsi adalah pelaksanaan kerja yang dibutuhkan dalam hasil pendapat, keputusan, dan keterampilan yang memadai seperti familieritas.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007 adalah

1. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya menurut pasal 36 Kepmendagri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa, bahwa BPD mempunyai fungsi antara lain:

- a. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. Contohnya, dengan mempertahankan keberadaan suku-suku yang ada dalam masyarakat serta mengikut sertakan kepala-kepala suku tersebut dalam membuat keputusan dan peraturan untuk pembangunan desa.
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan dan peraturan desa bersama-sama Pemerintah desa. Contohnya BPD merumuskan rancangan peraturan desa tentang Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kekayaan desa dan juga BPD hendaknya ikut menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) desa.

- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa serta keputusan kepala desa, BPD hendaknya ikut mengawasi jalannya pemerintah desa sesuai dengan peraturan desa melalui LPJ. LPJ dilakukan setiap akhir tahun dan juga akhir masa jabatannya.
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang, yang dilakukan BPD secara terbuka dari masyarakat disampaikan ke kantor BPD secara tertulis maupun lisan kemudian dibahas oleh anggota BPD.

Arti penting dari pembuatan peraturan dan pengambilan kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan dan nilai-nilai dalam tindakan-tindakan yang terarah.

Peranan penyaluran aspirasi masyarakat tidak akan terlepas dari keterkaitannya dengan semua aspek yang terkait yaitu pemerintah desa dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam rangka memperoleh informasi yang dijadikan pertimbangan atau alternatif kebijaksanaan. Terlaksananya peranan penyaluran aspirasi masyarakat dapat dilihat dari bagaimana hubungannya dengan aspek-aspek pemerintah desa di satu pihak dan organisasi sosial kemasyarakatan di lain pihak.

2.5 Konsep Operasional

Untuk memudahkan menganalisa dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa konsep tentang penelitian ini. Konsep operasional yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional yang berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.

2. Otonomi Desa

Otonomi desa adalah kewenangan suatu desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah pusat didalamnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi soaial dan budaya setempat dan peraturan perundang-undangan.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka mastarakat yang ada didesa yang merupakan suatu badan atau wadah formal yang ditetapkan pemerintah dan difungsikan untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

4. Fungsi BPD

Fungsi utama yang harus dilaksanakan BPD sebagai lembaga demokrasi di desa yang selanjutnya dijelaskan dalam PERDA Kabupaten Karimun No. 13 2007 adalah mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat, legislasi, pengawasan

terhadap pelaksanaan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.6 Hipotesa

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat penulis tarik hipotesa sebagai berikut:

“Diduga Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Kurang Baik”.

2.7 Teknik Pengukuran Data

Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan Skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan (Sugiono, 2005:107).

Untuk menjawab pertanyaan ini maka ditetapkan pengukuran terhadap indikator pelaksanaan fungsi BPD dan dapat dinilai dengan kategori sangat berfungsi, berfungsi, kurang berfungsi, tidak berfungsi, sangat tidak berfungsi. Teknik pengukurannya adalah sebagai berikut:

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

- a. Mengayomi, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

Kriteria Pengukurannya:

1. Memahami fungsi mengayomi dan menjaga kelestarian Adat Istiadat
2. Menjalankan fungsi mengayomi
3. Memelihara dan melestarikan lembaga adat
4. Memberikan anggaran dalam penyelenggaraan Adat Istiadat
5. Mengikutsertakan kepala-kepala suku untuk membuat keputusan dan peraturan dalam hal pembangunan desa.

Pengukurannya:

- Sangat berfungsi : Apabila kelima kriteria diatas terpenuhi
- Berfungsi : Apabila empat dari lima kriteria diatas terpenuhi
- Kurang berfungsi : Apabila dua dari lima kriteria diatas terpenuhi
- Tidak berfungsi : Apabila satu dari lima kriteria diatas terpenuhi
- Sangat tidak berfungsi : Apabila tidak satu pun dari kriteria diatas terpenuhi

- b. Legislasi yaitu merumuskan, menetapkan kebijakan dan peraturan pemerintah desa bersama-sama pemerintah desa.

Kriteria Pengukurannya:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan Peraturan Desa
2. Membuat rancangan Peraturan Desa dan mengajukannya kepada Kepala Desa
3. Mengajukan perubahan terhadap setiap rencana Peraturan Desa

4. Merumuskan rancangan Peraturan Desa tentang PAD

5. Menetapkan APBDes

Pengukurannya:

Sangat berfungsi : Apabila kelima kriteria diatas terpenuhi

Berfungsi : Apabila empat dari lima kriteria diatas terpenuhi

Kurang berfungsi : Apabila dua dari lima kriteria diatas terpenuhi

Tidak berfungsi : Apabila satu dari lima kriteria diatas terpenuhi

Sangat tidak berfungsi : Apabila tidak satu pun dari kriteria diatas terpenuhi

- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa serta mengawasi keputusan Kepala Desa.

Kriteria Pengukurannya:

1. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan perundang-undangan lainnya

2. Melaksanakan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa

3. Mengawasi penggunaan APBDes

4. Mengawasi pelaksanaan pembangunan desa

5. Bertanggungjawab terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Desa

Pengukurannya:

Sangat berfungsi : Apabila kelima kriteria diatas terpenuhi

Berfungsi : Apabila empat dari lima kriteria diatas terpenuhi

Kurang berfungsi : Apabila dua dari lima kriteria diatas terpenuhi

Tidak berfungsi : Apabila satu dari lima kriteria diatas terpenuhi

Sangat tidak berfungsi : Apabila tidak satu pun dari kriteria diatas terpenuhi

- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Kriteria Pengukurannya:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi dengan baik
2. Mendapat masukan atau aspirasi dari masyarakat
3. Aspirasi disampaikan secara tertulis maupun lisan
4. Menanggapi masukan atau aspirasi dari masyarakat
5. Turun langsung ke masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat

Pengukurannya:

- | | |
|------------------------|---|
| Sangat berfungsi | : Apabila kelima kriteria diatas terpenuhi |
| Berfungsi | : Apabila empat dari lima kriteria diatas terpenuhi |
| Kurang berfungsi | : Apabila dua dari lima kriteria diatas terpenuhi |
| Tidak berfungsi | : Apabila satu dari lima kriteria diatas terpenuhi |
| Sangat tidak berfungsi | : Apabila tidak satu pun dari kriteria diatas terpenuhi |

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

Waktu penelitian terhitung dari bulan maret-mei 2010.

3.2 Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (**Sugiyono: 2005: 90**). Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah:

1. Pengurus BPD Sungai Ungar
2. Masyarakat Desa Sungai Ungar

- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (**Sugiono: 2005: 91**). Metode yang penulis pakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengurus BPD dan Perangkat Desa, metode yang penulis pakai adalah metode sensus yaitu menjadikan keseluruhan populasi yang ada menjadi sampel sekaligus responden.
2. Untuk masyarakat yang penulis gunakan tehnik *Simple Random Sampling*. Pengambl anggota sampel dari populasi dilakukan

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu dengan tingkat eror yaitu 10% (Sugiono, 2005 : 93). Jumlah sampel diketahui dengan menggunakan rumus solvin. (Umar, 2003 : 146)

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel didalam penelitian ini dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Jumlah	
		Populasi	Sampel
1.	Pengurus BPD	11	11
2.	Masyarakat	3090	97
	Jumlah Responden	3101	108

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Ungar, 2010

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{3090}{1 + 3090(10\%)^2}$$

$$n = \frac{3090}{1 + 3090 \cdot 0,01}$$

$$n = \frac{3090}{1 + 30,9}$$

$$n = \frac{3090}{31,9}$$

$$n = 97$$

Dimana : n = ukuran sampel

: N = total populasi

: e = tingkat error (toleransi kesalahan) dari sampel sebesar 10%

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan tujuan penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi (Pengamatan)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dalam melihat aktivitas yang telah terjadi pada Badan Permusyawaratan Desa Sungai Ungar.

b. Interview (Wawancara)

Metode ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan anggota BPD dan aparat Pemerintahan Desa Sungai Ungar. Cara ini digunakan untuk memperoleh data berkaitan yang diperlukan dalam penelitian ini, serta bertujuan untuk memperoleh data yang valid.

c. Angket (Kuisisioner)

Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui interview (wawancara), selanjutnya penulis menyusun suatu angket. Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui jawaban responden dalam mengungkapkan Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsinya di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan, yaitu informasi dan wawancara. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan meliputi Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber yang dapat menunjang aspek yang diteliti mengenai Desa SungaiUngar.

3.5 Teknik Analisa Data

Setelah data dan bahan yang dibutuhkan terkumpul, peneliti memilih dan mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian barulah diolah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan dilapangan dan disajikan dalam bentuk uraian dan tabel-tabel dan diuji menggunakan teori-teori yang sesuai.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis

Kecamatan Kundur adalah salah satu dari 9 Kecamatan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai letak dan wilayah yang strategis ditinjau dari pendekatan ekonomi. Sedangkan Desa Sungai Ungar merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

Jarak pusat pemerintahan Desa Sungai Ungar dengan Ibukota Propinsi adalah 83 Mil dan hanya bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi laut yaitu kapal laut. Sementara itu Desa Sungai Ungar ke Ibukota Kabupaten Karimun yaitu 28 Mil dan transportasi yang digunakan adalah transportasi laut seperti halnya ke Ibukota Propinsi yaitu speedboat atau kapal laut. Sedangkan untuk ke Ibukota Kecamatan masyarakat Desa Sungai Ungar biasa menggunakan transportasi darat karena masih satu pulau (*Sumber: Data Monografi Desa Sungai Ungar*).

Dilihat dari keadaan alamnya Desa Sungai Ungar memiliki luas wilayah 2500 Ha (25 km) dengan curah hujan 0,5 mm/tahun. Bentuk wilayah Desa Sungai Ungar yaitu datar sampai berombak 85% sedangkan berombak samapai berbukit 15%. Disini dapat dilihat bahwa Desa Sungai Ungar terletak di dataran rendah yang rawan sekali banjir apabila curah hujan meningkat dan air laut naik.

Desa Sungai Ungar mempunyai luas wilayah 2500 Ha (25 km) dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Ungar Utara.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Sebesi.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sawang.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Anai.

Desa Sungai Ungar juga memiliki 5 (buah) dusun, 10 (sepuluh) rukun warga (RW), 23 (dua puluh tiga) rukun tetangga (RT). Adapun dusun-dusun yang ada di Desa Sungai Ungar adalah.

1. Dusun I Parit Pacitan
2. Dusun II Parit Gantung.
3. Dusun III Parit Bengkok
4. Dusun IV Parit Tegak, dan
5. Dusun V Parit Mangkil.

4.2 Keadaan Penduduk

Mayoritas penduduk Desa Sungai Ungar merupakan penduduk tempatan (asli) dan menurut laporan kependudukan sampai dengan bulan Maret berjumlah 3090 jiwa yang terdiri dari 378 Kepala Keluarga (KK) yaitu laki-laki berjumlah 1562 jiwa dan perempuan berjumlah 1489 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah penduduk Desa Sungai Ungar berdasarkan jenis kelamin pada tabel IV.1 berikut ini:

Tabel 4.1

**Keadaan Penduduk Desa Sungai Ungar
Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2010**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1582	51,20%
2	Perempuan	1508	48,80%
	Jumlah	3090	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Ungar tahun 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Sungai Ungar lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Untuk melihat jumlah penduduk berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pad tabel 4.2 berikut ini

**Tabel 4.2
Keadaan Jumlah penduduk Desa Sungai Ungar
Menurut tingkat umur pada tahun 2010**

No	Tingkat Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	0 – 8 tahun	96	93	189
2	9 - 17 tahun	121	119	240
3	18 - 26 tahun	143	164	307
4	27 – 35 tahun	524	496	1020
5	36 - 44 tahun	322	244	566
6	> 45 tahun	376	392	768
	Jumlah	1582	1508	3090

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Ungar tahun 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Sungai Ungar yang memiliki jumlah terbanyak adalah yang berumur antara 27-35 tahun.

Selanjutnya dilihat dari mata pencariannya penduduk Desa Sungai Ungar sebagian besar adalah menjadi petani, hal ini dikarenakan di Desa Sungai Ungar terdapat banyak lahan perkebunan terutama perkebunan karet. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3
Keadaan Penduduk Desa Sungai Ungar
Berdasarkan Mata Pencarian Pada Tahun 2010

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	Petani	1790	57,93%
2	Buruh	81	2,65%
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	46	1,50%
4	Pedagang/Wiraswasta	36	1,18%
5	Tukang Kayu	25	0,82%
6	Nelayan	16	0,52%
7	Pengangkutan	9	0,29%
8	Tukang mesin	7	0,23%
9	Pensiunan	7	0,23%
10	Pengusaha	5	0,16%
11	Pengrajin	3	0,10%
12	ABRI	2	0,06%
13	Honor Daerah	37	1,21%
14	Dll	1039	33,63%
	Jumlah	3090	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Ungar Tahun 2010

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Desa Sungai Ungar bekerja sebagai petani yang merupakan pekerjaan umum bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan yaitu berjumlah sekitar 1751 orang atau 57,93%.

Penduduk Desa Sungai Ungar mayoritas adalah beragama Islam selebihnya mereka memeluk agama Budha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Keadaan Penduduk Desa Sungai Ungar
Berdasarkan Agama Pada Tahun 2010

No	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	2953	95,58%
2	Katholik	-	-
3	Protestan	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	137	4,42%
	Jumlah	3090	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Ungar 2010

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Sungai Ungar mayoritas memeluk agama Islam dengan jumlah 2953 orang atau 95,58%.

Pendidikan nasional yang berakar pada budaya bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa yang pada akhirnya membentuk manusia Indonesia yang berkualitas dan bermutu, oleh sebab itu pendidikan harus dikembangkan guna mencapai masyarakat Indonesia yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi.

Pada tabel 4.5 berikut ini adalah keadaan penduduk Desa Sungai Ungar berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 4.5
Keadaan Penduduk Desa sungai Ungar
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	247	7,99%
2	Tidak tamat sekolah	16	0,53%
3	Tamat SD/Sederajat	240	7,76%
4	Tamat SLTP/Sederajat	230	7,44%
5	Tamat SLTA/Sederajat	1575	50,97%
6	Tamat Akademi	82	2,65%
7	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	167	5,40%
8	DII	533	17,24%
	Jumlah	3090	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa sungai Ungar Tahun 2010

Dilihat dari tabel 4.5 diatas tingkat pendidikan penduduk Desa Sungai Ungar yang paling tinggi adalah tamatan SLTA/ sederajat yaitu 1575 orang atau 50,97%. Bila dilihat tingkat pendidikan, penduduk Desa Sungai Ungar tergolong berpendidikan baik.

4.3 Keadaan Infrastruktur Desa

4.3.1 Sarana Pendidikan

Untuk keberhasilan pendidikan maka harus ditunjang sarana pendidikan yang memadai, sarana pendidikan ini penting sekali keberadaannya karena majunya suatu daerah terlihat dari tersedianya sarana pendidikan baik tu formal maupun informal. Untuk menunjang majunya pendidikan di Desa Sungai Ungar maka Pemerintah menyediakan sarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Desa sungai Ungar dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6
Sarana Pendidikan Di Desa Sungai Ungar Tahun 2010

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK/SD	7 buah
2	Gedung SLTP/MTs	1 buah
3	Gedung SLTA	1 buah
4	Gedung TPQ	5 buah
	Jumlah	14 buah

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Ungar Tahun 2010

4.3.2 Sarana Ibadah

Penduduk Desa Sungai Ungar sebagian besar memeluk agama Islam dan sisanya mereka memeluk agama Budha. Sebagai desa mayoritas beragama Islam di

Desa Sungai Ungar telah berdiri mesjid atau rumah ibadah yang digunakan untuk kegiatan keagamaan. Sedangkan bagi umat Budha karena jumlahnya yang minoritas untuk beribadah mereka harus pergi ke Vihara yang letaknya di Ibukota Kecamatan.

Untuk lebih jelasnya jumlah mesjid atau rumah ibadah yang terdapat di Desa Sungai Ungar dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Sarana Ibadah di Desa Sungai Ungar Tahun 2009

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	5 buah
2	Surau/langgar	7 buah
	Jumlah	12 buah

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Ungar Tahun 2010

4.3.3 Sarana Kesehatan

Untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan, maka di Desa Sungai Ungar telah didirikan sebuah Puskesmas Pembantu, 5 buah Posyandu dan sebuah Polindes yang dibuka setiap hari kecuali Posyandu dan siap unyu melayani masyarakat yang ingin berobat, dengan tenaga medis sebanyak 3 orang.

Dibawah ini adalah sarana kesehatan yang didirikan Desa Sungai Ungar yaitu pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Sarana Kesehatan di Desa Sungai Ungar Tahun 2010

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas Pembantu	1 buah
2	Posyandu	5 buah
3	Polindes	1 buah
	Jumlah	7 buah

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Ungar Tahun 2010

4.3.4 Sarana Transportasi

Untuk menghubungkan masyarakat dengan daerah lain membutuhkan sarana transportasi yaitu dengan menggunakan jasa angkutan umum darat maupun laut. Untuk sarana transportasi rata-rata penduduk telah memiliki kendaraan sendiri. Untuk ke Kota Kecamatan masyarakat biasanya menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum yaitu oplet. Sedangkan untuk ke Kabupaten masyarakat menggunakan Kapal Laut atau Speed boat yang beroperasi setiap harinya.

4.3.5 Sarana Perhubungan

Di Desa Sungai Ungar sarana perhubungan darat terdapat fasilitas jalan yang cukup baik terdiri dari jalan aspal, jalan semenisasi, dan jalan tanah yang kondisinya masih baik. Sedangkan sarana perhubungan laut terdapat 1 (satu).

4.4 Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Ungar

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberi wewenang legislatif dan mempunyai wewenang yang efektif mengawasi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berwenang untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas kinerjanya dalam menjalankan Pemerintahan Desa.

Pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terletak pada sumber daya manusia dan daya dukung anggota didalamnya atau mekanisme yang ada, sehingga dengan itu sejumlah alat kelengkapan organisasi yang didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 13 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Ungar yang dilantik pada tanggal 31 januari oleh Camat Kunder dengan Surat Keputusan Bupati No. 141/B/01/23/2007, adapun komposisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun dapat dilihat pada *lampiran 1* selengkapnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Ungar sampai saat ini belum memiliki tata tertib keanggotaan BPD dan program kerja 5 (lima) tahun. Pelaksanaan kerja sampai saat ini mengacu pada PERDA Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana yang dimaksud dengan BPD adalah:

1. Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
2. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa.

Proses pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan lapangan proses pemilihan ini berjalan dengan lancar dan partisipasi masyarakat yang memberikan suaranya cukup besar, selanjutnya calon anggota yang dinyatakan terpilih ditetapkan atau ditentukan berdasarkan urutan terbanyak perolehan suaranya. Adapun persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD sesuai dengan PERDA Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007 pasal 6 menyebutkan:

- a. Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat
- e. Pada saat dicalonkan berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya terbatas serta terdaftar sebagai penduduk Desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Berkelakuan baik

- h. Tidak pernah dihukum penjara karena tindakan pidana kejahatan.
- i. Tidak dicabut hak pilihnya
- j. Belum pernah menjadi anggota BPD selama 2 kali masa jabatan di Desa bersangkutan.
- k. Mengenali desanya dan dikenali oleh masyarakat Desa setempat.
- l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Selanjutnya tata cara pencalonan dan penetapan anggota BPD disebutkan dalam PERDA Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007 pasal 7 yang berbunyi:

1. Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
2. Mekanisme pencalonan dan penetapan anggota BPD adalah:
 - a. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan anggota BPD, Kepala Desa memproses pencalonan dan penetapan calon anggota BPD.
 - b. Kepala Desa mengadakan musyawarah Desa untuk menentukan pembagian distrik/wilayah, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
 - c. Masing-masing distrik/wilayah mengadakan musyawarah dan mufakat untuk mengusulkan calon anggota BPD berdasarkan kuota yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara.
 - d. Peserta musyawarah ditingkat distrik/wilayah adalah ketua Rukun Warga, golongan profesi, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
 - e. Calon anggota BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan penetapannya kepada Bupati melalui camat.

Berdasarkan jumlah penduduk Desa Sungai Ungar, maka ditetapkan jumlah anggota BPD yaitu 11 orang, hal ini telah diatur dalam PERDA Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007 pasal 5 yaitu:

1. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan jumlah penduduk.
2. Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. Jumlah penduduk 1001 dari 0 sampai dengan 1000 jiwa, 5 orang anggota
 - b. Jumlah penduduk 1001 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota.
 - c. Jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota.
 - d. Jumlah penduduk lebih dari 2500 jiwa, 11 anggota.

Tugas BPD yang tertera didalam PERDA Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD.

Sedangkan fungsi BPD menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Fungsi BPD yang tertera dalam UU No. 32 tahun 2004 sama seperti yang diutarakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007 yaitu:

BPD berfungsi menetapkan peraturan-peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sebagai lembaga legislatif desa BPD mempunyai hak antara lain sebagai berikut:

- a. Meminta keterangan kepada Kepala Desa
- b. Menyatakan pendapat
- c. Mengadakan perubahan rencana Peraturan Desa
- d. Menetapkan tata tertib BPD

Hal diatas diatur dalam PERDA Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007 pasal 10.

Selanjutnya BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerja kepada masyarakat paling sedikit satu kali setahun dalam musyawarah desa (PERDA Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007 pasal 11).

Sedangkan hak anggota BPD yang terdapat dalam PERDA Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007 pasal 12 yaitu:

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa

- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Memperoleh tunjangan

Masih dalam pasal 12 PERDA Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007, kewajiban anggota BPD adalah:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Dalam menjalankan tugasnya baik sebagai pimpinan dan anggota BPD terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh pimpinan atau anggota

BPD itu sendiri. Larangan tersebut sesuai seperti yang terdapat dala pasal 13 PERDA Kabupaten Karimun No. 13 tahun 2007 yang berbunyi:

1. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Pimpinan dan anggota BPD dilarang:
 - a. Sebagai pelaksana proyek desa.
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 - d. Menyalahgunakan wewenang.
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Dalam melakukan pemilihan pimpinan BPD ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh anggota BPD. Hal-hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam PERDA Kabupaten Karimun No. 13 tahun 2007 pasal tentang pimpinan BPD:

1. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, satu orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
2. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
3. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

Mekanisme rapat BPD yang diatur dalam PERDA Kabupaten Karimun No. 13 tahun 2007 pasal 15 adalah sebagai berikut:

1. Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
2. Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
3. Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota jumlah anggota BPD yang hadir.
4. Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan Notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib BPD atau asas kesepakatan pimpinan BPD (PERDA Kabupaten Karimun No. 13 tahun 2007 pasal 16).

Untuk tunjangan BPD hal ini diatur didalam PERDA Kabupaten Karimun No. 13 tahun 2007 pasal 19 yaitu:

1. Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
2. Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Sedangkan biaya operasional BPD seperti yang dijabarkan di dalam PERDA Kabupaten Karimun No. 13 tahun 2007 pasal 20 diperoleh dari:

1. Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
2. Biaya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan (PERDA Kabupaten Karimun No. 13 tahun 2007 pasal 21).

Dalam pasal 22 PERDA Kabupaten Karimun No. 13 tahun 2007 disebutkan bahwa keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya Anggota BPD yang baru.
- d. Melanggar sumpah/janji.
- e. Terdakwa atau terpidana.
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- g. Berpindah penduduk dan bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan.

- h. Bekerja di luar wilayah Desa, Kabupaten, Propinsi lebih 4 (empat) bulan berturut-turut sehingga tidak bisa bekerja sebagai anggota BPD.

4.5 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Ungar

Struktur organisasi bertalian erat dengan organisasi secara keseluruhan penyusunan struktur organisasi merupakan salah satu tugas ketua untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Untuk itu ketua BPD harus dapat menyusun struktur organisasi dengan baik.

Menurut Richard (1979), mengatakan bahwa struktur organisasi itu adalah suatu yang terdapat dimana-mana untuk seseorang yang mempunyai kontak dengan orang lain. Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa struktur organisasi tersebut adalah suatu kerangka yang terdapat disetiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah.

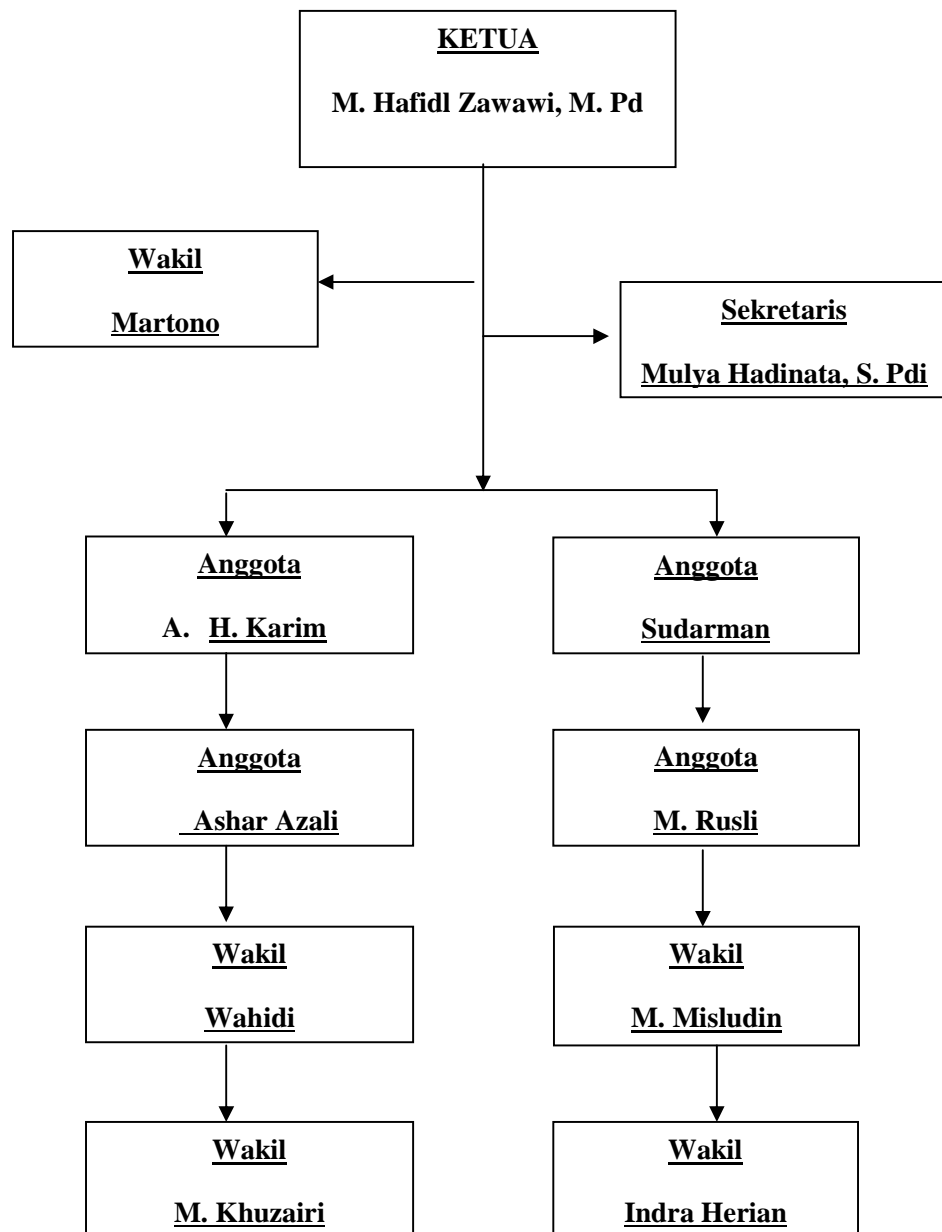
Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Ungar memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

Setelah struktur organisasi disusun didalam setiap organisasi, maka untuk selanjutnya akan digambar melalui bagan. William Grant Ireson dalam Sutarto (2002:202), mengatakan bahwa bagan organisasi akan menunjukkan bagaimana

informasi mengalir dari satuan organisasi yang satu kesatuan organisasi dengan yang lain. Tingkatan tanggung jawab, dari mana informasi berasal dan kemana tempat tujuan terakhir.

Sejalan dengan hal diatas Lyman a. Keith dan Carlo E. Gubllini dalam Sutarto (2002:211) mengatakan bahwa pembuatan bagan adalah sesuatu yang membantu dalam memberikan penggambaran dan perencanaan suatu organisasi hal itu dapat memecahkan masalah organisasi.



Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Ungar Tahun 2010

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Telah diketahui sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan penyebaran angket kepada sebagian penduduk/masyarakat di Desa Sungai Ungar dengan jumlah sample 108 orang responden yang terdiri dari anggota BPD dan masyarakat. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemui di lapangan.

Adapun dasar pertimbangan pihak diatas tersebut sebagai responden adalah karena kesemua unsur diatas tersebut dianggap mewakili dan mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Identitas responden disajikan pada tabel-tabel berikut menurut umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan responden. Untuk lebih jelasnya mengenai identitas responden maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

5.1.1 Keadaan Responden Berdasarkan Umur

Keadaan yang dimaksud adalah keadaan umur anggota BPD dan masyarakat sebagai responden dalam penelitian ini.

Berikut ini adalah data tentang kategori responden yang ditinjau dari tingkat umur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Keadaan Responden Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	< 16	30	11,50%
2	17-55	40	35,40%
5	>56	38	11,50%
	Jumlah	108	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2010

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah responden yang berumur < 16 tahun berjumlah 30 orang dengan persentase 11,50%, responden yang berumur 17-55 tahun berjumlah 40 orang dengan persentase 35,40%, dan responden > 56 tahun berjumlah 38 orang dengan persentase 11,50%. Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat umur responden yang paling banyak berkisar antara 17-55 tahun yaitu sebanyak 40 orang responden.

5.1.2 Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini merupakan data responden ditinjau dari jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Data ini dibuat untuk melihat perbandingan antara jumlah responden laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini:

Tabel 5.2
Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	66	61,06%
2	Perempuan	42	38,94%
	Jumlah	108	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2010

Jika dilihat dari tabel 5.2 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 66 orang dengan persentase 61,06% sedangkan 42 responden atau 38,94% berjenis kelamin perempuan.

5.1.3 Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Selanjutnya penulis akan menyajikan data tingkat pendidikan responden pada tabel V.3 dibawah ini:

Tabel 5.3
Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SD/ sederajat	26	23,89%
2	SMP/ sederajat	15	14,15%
3	SMA/ sederajat	36	33,62%
4	Strata satu/ akademi	31	28,31%
	Jumlah	108	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan tahun 2010

Untuk tingkat pendidikan responden terlihat bahwa tingkat pendidikan SD/ sederajat sebanyak 26 orang dengan persentase 23,89%, tingkat pendidikan SMP/ sederajat sebanyak 15 orang dengan persentase 14,15%, tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 36 orang dengan persentase 33,62%, sedangkan tingkat pendidikan strata satu/ akademi sebanyak 31 orang dengan persentase sebesar 28,31%. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian responden berlatar belakang pendidikan SMA/ sederajat.

1.1.4 Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berikut ini merupakan data responden dilihat dari latar belakang pekerjaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.4 berikut ini:

Tabel 5.4
Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Petani	24	22,12%
2	Nelayan	4	3,53%
3	Ibu Rumah Tangga	12	11,50%
4	Pegawai Negeri Sipil	15	14,15%
5	Wiraswasta	17	15,92%
6	Honor Daerah/Honoror	22	20,35%
7	Pedagang	5	4,42%
8	Pelajar/Mahasiswa	5	4,42%
9	Pensiunan	4	3,53%
	Jumlah	108	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2010

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui bahwa responden yang bekerja sebagai petani adalah 24 orang dengan persentase 22,12%, responden yang bekerja sebagai nelayan adlah 4 orang dengan persentase 3,53%, responden yang bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga sebanyak 12 orang dengan persentase 11,50%, responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah 15 orang dengan persentase 14,15%, responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 17 orang dengan persentase 15,92%, responden yang bekerja sebagai honor daerah/honoror sebanyak 22 orang dengan persentase 20,35%, responden yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 5 orang dengan persentase 4,42%, responden dari pelajar atau mahasiswa sebanyak 5 orang dengan persentase 4,42%, sedangkan responden yang

pekerjaannya sebagai pensiunan sebanyak 4 orang dengan persentase 3,53%. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa responden dengan jenis pekerjaan terbanyak adalah yang bekerja sebagai petani yaitu 24 orang dengan jumlah persentasenya adalah 22,12%.

5.2 Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

Merujuk Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tertera jelas bahwa keberadaan lembaga legislatif daerah memiliki wewenang, hak, tugas dan fungsi yang sangat berbeda dibandingkan masa lalu.

Hakikat Otonomi Daerah adalah efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang pada akhirnya bernuansa pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, disamping itu untuk memberikan peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi.

Salah satu tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari pelaksanaan otonomi daerah sehingga mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama.

BPD sebagai parlemen desa (BPD) di era otonomi daerah dinilai sebagai institusi politik demokrasi ditingkat desa yang membangkitkan kembali demokrasi dimasyarakat pedesaan sebagai pengganti Lembaga Masyarakat Desa (LMD) yang

selama ini dikendalikan oleh tangan-tangna Negara. Hadirnya BPD memberikan suasana baru yang lebih kondusif dalam menegakkan demokrasi Desa. BPD diharapkan menjadi wadah atau “gelanggang” politik baru bagi warga desa dalam membangun tradisi berdemokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa.

Selain bercermin kepada UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Kabupaten Karimun telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 tentang BPD. BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Kepala Desa. Dimana BPD memiliki tugas dan fungsi yang harus mereka jalankan.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun maka penulis akan menguraikan secara rinci sesuai dengan indikator yang ada. Berikut ini akan disajikan data mengenai jawaban responden terhadap seluruh pertanyaan berdasarkan kuisisioner sebagai berikut.

5.2.1 Mengayomi Adat Istiadat

Asas dari adat istiadat adalah memelihara keseimbangan dalam berhubungan kerukunan anantara manusia, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan alam lingkungan. Fungsi adat istiadat sejak dahulu sampai sekarang ini, masih tetap terpelihara dalam mengatur kehidupan masyarakat dengan tidak mengurangi bahwa

masyarakat masih mematuhi peraturan, perundang-undangan dan tetap menjalankan syari'at agama islam. Jadi sepanjang halnya diatur oleh perundang-undangan dan tidak termasuk dalam bidang syari'at agama islam, adat istiadat tetaplah diperlukan.

Dari sisi kehidupan demokrasi, adat istiadat juga telah dimanfaatkan, nyatanya sampai pada saat sekarang ini sistem kekeluargaan masih berurat akar diseluruh sudut Negara Republik Indonesia.

Karena adat merupakan salah satu bentuk asli dari budaya desa, maka peranan pemerintah dalam hal ini BPD sangat menentukan, dikatakan menentukan karena BPD merupakan representatif dari masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam pemerintahan desa, bila mana BPD tidak dapat memperhatikan masyarakat, otomatis pelayanan yang diberikan pemerintah desa, baik Kepala Desa maupun perangkat desa dan BPD sebagai lembaga legislasi tidak akan berhasil menciptakan kinerjanya secara maksimal, dari pada itu untuk mengetahui sejauh mana BPD dalam menjalankan peranannya dalam mengayomi adat istiadat di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, dapat dilihat berdasarkan tabel yang telah penulis paparkan dibawah :

Tabel 5.5 : Tanggapan Responden (BPD) Tentang Mengayomi Adat Istiadat di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

Indikator Pertanyaan	Persentase										Total	
	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak setuju			
	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%
Sebagai anggota BPD saya memahami fungsi mengayomi dan menjaga kelestarian Adat Istiadat	3	27,2	6	54,5	2	18,1	-	-	-	-	11	100%

Sebagai anggota BPD saya menjalankan fungsi mengayomi Adat Istiadat dengan baik	5	45,4	4	36,3	2	18,1	-	-	-	-	11	100%
Sebagai anggota saya BPD memelihara dan melestarikan Lembaga Adat dengan baik	6	54,5	3	27,2	2	18,1	-	-	-	-	11	100%
BPD ikut memberikan Anggaran dalam penyelenggaraan Adat Istiadat	5	45,4	3	27,2	3	27,2	-	-	-	-	11	100%
Saya Mengikutsertakan Kepala-kepala Suku untuk membuat keputusan dan peraturan dalam hal pembangunan Desa.	3	27,2	5	45,4	2	18,1	1	9,1	-	-	11	100%
Jumlah	22	199,7	21	190,6	11	99,6	1	9,1	-	-	11	100%
Rata – rata	4,4	39,9	4,2	38,1	2,2	19,9	0,1	1,8	-	-	11	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2010

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dari tabel diatas dapat kita lihat secara keseluruhan jawaban responden (BPD) yang sangat setuju tentang BPD memahami fungsi mengayomi dan menjaga kelestarian Adat Istiadat di Desa sungai Ungar sebanyak 3 orang (27,2%), responden yang menjawab setuju sebanyak 6 orang (54,5%), dan responden yang menjawab netral sebanyak 2 orang (18,1%).

Sejalan dengan hal tersebut menurut hasil penelitian yang penulis rangkum dilapangan melalui wawancara dengan Anggota BPD yaitu Bapak Mulyadinata menerangkan bahwa di Desa Sungai Ungar memang sudah menjalankan fungsi mengayomi ini dengan sangat baik.

Dari tabel diatas jawaban responden yang sangat setuju mengenai BPD menjalankan fungsi mengayomi Adat Istiadat di Desa Sungai Ungar sebanyak 5

orang (45,5%), responden yang menjawab setuju sebanyak 4 orang (36,3%), dan responden yang menjawab netral sebanyak 2 orang (18,1%).

Dan dilihat dari tabel diatas dapat diketahui dari jawaban responden tentang BPD memelihara dan melestarikan Lembaga Adat dengan baik, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang responden (54,5%), responden yang menjawab setuju sebanyak 3 orang (27,2%), dan responden yang menjawab netral sebanyak 2 orang (18,1%).

Kemudian dari tabel diatas dapat dilihat dari pada tanggapan responden mengenai BPD dalam memberikan anggaran dalam membina Lembaga Adat, sebanyak 5 orang responden (45,5%) menjawab sangat setuju BPD memberikan anggaran dalam membina Lembaga Adat, 3 orang responden (27,2%) menjawab setuju, dan sebanyak 3 orang responden (27,2%) yang menjawab netral.

Sedangkan jawaban responden mengenai keikutsertaan kepala-kepala suku untuk membuat keputusan dalam hal pembangunan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang responden (27,2%), responden yang menyatakan setuju sebanyak 5 orang (45,5%), 2 orang responden (18,1%) menyatakan netral, dan sebanyak 1 orang responden (9,1%) yang menjawab tidak setuju.

Selanjutnya pada tabel 5.6 dapat dilihat tanggapan responden (masyarakat) fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengayomi Adat Istiadat sebagai berikut:

Tabel 5.6 : Tanggapan Responden (Masyarakat) Tentang Mengayomi Adat Istiadat di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

Indikator Pertanyaan	Persentase										Total	
	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak setuju			
	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%

BPD mengayomi dan menjaga kelestarian Adat Istiadat yang berkembang di Desa saya dengan baik	-	-	-	-	22	22,6	55	56,7	20	20,6	97	100%
Fungsi BPD dalam mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat dimaksudkan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan	-	-	9	9,2	22	22,6	41	42,2	25	25,7	97	100%
Menurut saya BPD dapat mempertahankan suku-suku yang dalam masyarakat	-	-	16	16,4	12	12,3	54	55,6	15	15,4	97	100%
BPD mengikutsertakan Kepala-kepala Suku untuk membuat keputusan dan peraturan dalam hal pembangunan Desa	-	-	14	14,4	17	17,5	49	50,5	17	17,5	97	100%
Di Desa saya anggaran BPD ikut mendanai Lembaga Adat	-	-	14	14,4	11	11,3	47	48,4	25	25,7	97	100%
Jumlah	-	-	53	54,4	84	86,3	246	253,4	102	104,9	97	100%
Rata-rata	-	-	10,6	10,8	16,8	17,2	49,2	50,6	20,4	20,9	97	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2010

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dari tabel diatas dapat kita lihat secara keseluruhan jawaban responden (masyarakat) yang menjawab netral tentang BPD memahami fungsi mengayomi dan menjaga kelestarian Adat Istiadat di Desa sungai Ungar sebanyak 22 orang (22,6%), responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 55 orang (56,75%), dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 20 orang (20,6%).

Dari tabel diatas jawaban responden yang setuju mengenai fungsi BPD mengayomi dan menjaga Adat Istiadat dimaksudkan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan sebanyak 9 orang (9,2%), responden yang menjawab

netral sebanyak 22 orang (22,6%), responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 41 orang (42,2%), dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 25 orang (25,7%).

Dan dilihat dari tabel diatas dapat diketahui dari jawaban responden tentang BPD dapat mempertahankan suku-suku yang ada dalam masyarakat responden yang menyatakan setuju sebanyak 16 orang responden (16,4%), responden yang menjawab netral sebanyak 12 orang (12,3%), responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 54 orang (55,6%), dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 15 orang (15,4%).

Kemudian dari tabel diatas dapat dilihat dari pada tanggapan responden mengenai BPD mengikutsertakan kepala-kepala suku dalam membuat keputusan dan peraturan untuk pembangunan desa, sebanyak 14 orang responden (14,4%) menjawab setuju, 17 orang responden (17,5%) menjawab netral, sebanyak 49 orang responden (50,5%) yang menjawab tidak setuju, dan sebanyak 17 orang (17,5%) menjawab sangat tidak setuju.

Sedangkan jawaban responden mengenai anggaran BPD ikut mendanai Lembaga Adat yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang responden (14,4%), responden yang menyatakan netral sebanyak 11 orang (11,3%), 47 orang responden (48,4%) menyatakan tidak setuju, dan sebanyak 25 orang responden (25,7%) yang menjawab sangat tidak setuju.

5.2.2 Legislasi

Fungsi legislasi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa atau disebut juga fungsi legislasi ini yakni merumuskan dan menetapkan peraturan desa menurut pasal 48 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1999, bahwa : ayat (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa atau BPD, ayat (2) Kepala Desa menetapkan peraturan desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Dengan demikian, fungsi BPD hampir sama dengan DPRD tingkat Kabupaten dan Provinsi yang berfungsi sebagai pemberi persetujuan terhadap peraturan desa yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan desa. Oleh karena BPD memiliki peranan penting dan tanggung jawab yang besar dalam menentukan peraturan desa, maka anggota BPD harus mempelajari, memahami, menganalisa, dan mempertimbangkan secara matang tentang peraturan desa yang akan dituju tersebut, untuk itu setiap anggota BPD harus mengenyampingkan segala kepentingan pribadi, kelompok dan pihak-pihak tertentu dalam persetujuan peraturan desa.

Menurut Arbi Sani dalam **Rauf dan Zulfan (2004 : 35)** bahwa fungsi BPD yang mencirikan demokrasi modern ini memperkenalkan nama Badan Legislatif atau pembuat Undang-undang. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya dalam pasal-pasal yang dihasilkan dalam waktu yang bersamaa, parlemen pula sebagai unsur pemerintah atau memberi dukungan kepada eksekutif dan yudikatif sebagai lembaga Pemerintahan selain dirinya melalui kewenangan mengatur masyarakat yang dikandung oleh pasal Undang-undang yang sama..

Begitu juga BPD, dimana lembaga ini juga memiliki wewenang membuat peraturan desa bersama kepala desa yang nantinya akan menghasilkan peraturan desa. Sehubungan dengan itu untuk mengetahui sejauh mana BPD sebagai lembaga Legislasi yang berfungsi merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa Sungai Ungar dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 5.7 : Tanggapan Responden (BPD) Tentang Legislasi di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

Indikator Pertanyaan	Persentase										Total	
	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak setuju			
	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%		
Saya merumuskan dan menetapkan kebijakan dan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa	4	36,3	5	45,4	2	18,1	-	-	-	-	11	100%
Saya ikut membuat rancangan Peraturan Desa dan mengajukannya kepada Kepala Desa	3	27,2	6	54,5	2	18,1	-	-	-	-	11	100%
Saya selalu mengajukan perubahan terhadap	5	45,4	5	45,4	1	9,1	-	-	-	-	11	100%

setiap rencana Peraturan Desa												
Saya ikut merumuskan rancangan Peraturan tentang Pendapatan Asli Desa (PAD)	4	36,3	7	63,6	-	-	-	-	-	-	11	100%
Ikut menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa	2	18,1	7	63,6	2	18,1	-	-	-	-	11	100%
Jumlah	18	163,3	30	272,5	7	63,4	-	-	-	-	11	100%
Rata – rata	3,6	32,6	6	54,5	1,4	12,6	-	-	-	-	11	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2010

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dari tabel dapat kita lihat jawaban responden tentang ikut merumuskan dan menetapkan kebijakan dan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang (36,3%), responden yang menjawab setuju sebanyak 5 orang (45,4%), dan sebanyak 2 orang responden (18,1%) yang menjawab netral.

Dan untuk jawaban responden tentang ikut membuat rancangan peraturan desa, dan mengajukannya kepada Kepala Desa, sebanyak 3 orang (27,2%) menjawab sangat setuju, sebanyak 6 orang (54,5 %) menjawab setuju, dan sebanyak 2 orang (18,1%) menjawab netral.

Untuk jawaban responden tentang selalu mengajukan perubahan terhadap setiap rencana peraturan desa, sebanyak 5 orang (45,4%), responden menjawab sangat setuju, 5 orang (45,4%), menjawab setuju, dan sebanyak 1 orang (9,1%) menjawab netral.

Kemudian untuk jawaban responden tentang ikut merumuskan rancangan peraturan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebanyak 4 orang (36,3%) menjawab sangat setuju, sebanyak 7 orang (63,6%) menjawab setuju.

Dan jawaban responden tentang ikut menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa, sebanyak 2 orang (18,1%) responden menjawab sangat setuju, sebanyak 7 orang (63,6%) menjawab setuju, dan sebanyak 2 orang (18,1%) menjawab netral.

Selanjutnya dapat pula kita lihat tanggapan responden (masyarakat) mengenai fungsi Legislasi ini berdasarkan Tabel 5.8 dibawah ini :

Tabel 5.8 : Tanggapan Responden (Masyarakat) Tentang Legislasi di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

Indikator Pertanyaan	Persentase										Total	
	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak setuju			
	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%
Menurut saya BPD Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa	-	-	12	12,3	16	16,4	46	47,4	23	23,7	97	100%
BPD Ikut membuat rancangan Peraturan Desa bersamaKepala Desa	-	-	7	7,2	17	17,5	55	56,7	18	18,5	97	100%
BPD Mengajukan perubahan terhadap setiap rencana Peraturan Desa	-	-	11	11,3	13	13,4	63	64,9	10	10,3	97	100%
BPD Ikut merumuskan rancangan Peraturan tentang Pendapatan Asli	-	-	14	14,4	5	5,1	63	64,9	15	15,4	97	100%

Desa (PAD)												
BPD ikut menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa	-	-	10	10,3	9	9,2	63	64,9	15	15,4	97	100%
Jumlah	-	-	54	55,5	60	61,6	290	298,8	81	83,3	97	100%
Rata – rata	-	-	10,8	11,1	12	12,3	58	59,7	81	16,6	97	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2010

SS = Sangat Setuju
S = Setuju
N = Netral
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

Dari tabel diatas dapat kita lihat secara keseluruhan jawaban responden yang menjawab setuju tentang BPD merumuskan dan menetapkan kebijakan dan peraturan desa bersama-sama Kepala Desa sebanyak 12 orang (12,3%), responden yang menjawab netral sebanyak 16 orang (16,4%), responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 46 orang (47,4%), dan sebanyak 23 orang (23,7%) responden menjawab sangat tidak setuju.

Dan dari tabel diatas untuk jawaban responden yang setuju mengenai BPD ikut membuat rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, sebanyak 7 orang (7,2%), responden yang menjawab netral sebanyak 17 orang (17,5%), responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 55 orang (56,7%), dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 18 orang (18,5 %).

Dari hal tersebut dengan adanya wawancara yang penulis lakukan dilapangan, bersama salah satu anggota masyarakat Desa Sungai Ungar Bapak Zulkarnaen, beliau menyatakan bahwasanya BPD belum pernah melakukan penetapan mengenai Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Untuk jawaban responden tentang BPD selalu mengajukan perubahan terhadap setiap rancangan Peraturan Desa responden yang menyatakan setuju sebanyak 11 orang responden (11,3%), responden yang menjawab netral sebanyak 13 orang (13,4%), responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 63 orang (64,9%), dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 10 orang (10,3%).

Kemudian dari tabel diatas dapat dilihat dari pada tanggapan responden mengenai BPD merumuskan rancangan peraturan tentang Pendapatan Asli Desa, sebanyak 14 orang responden (14,4%) menjawab setuju, 5 orang responden (5,1%) menjawab netral, sebanyak 63 orang responden (64,9%) yang menjawab tidak setuju, dan sebanyak 15 orang (15,4%) menjawab sangat tidak setuju.

Sedangkan jawaban responden mengenai anggaran BPD ikut menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa yang menyatakan setuju sebanyak 10 orang responden (10,3%), responden yang menyatakan netral sebanyak 9 orang (9,2%), 63 orang responden (64,9%) menyatakan tidak setuju, dan sebanyak 15 orang responden (15,4%) yang menjawab sangat tidak setuju.

5.2.3. Pengawasan

Setelah melaksanakan fungsi mengayomi dan fungsi legislasi, maka BPD juga diberikan tugas untuk mengawasi jalannya peraturan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Menurut S.P Siagian (2001 : 49) pengawasan adalah merupakan langkah dan sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting

dikatakan demikian karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang tercantum dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Menurut DR. Kartini kartono (2002 : 153) memberikan pengertian pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerjasama dengan baik kearah pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Kegiatan pengawasan yang harus dilakukan oleh anggota BPD ialah menilai kerja pemerintah desa apakah telah sesuai dengan perencanaan masing-masing indikator yang menjadi objek pengawasan. Dari penilaian tersebut nantinya akan diketahui apakah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tersebut telah yang diharapkan bersama.

Selanjutnya kegiatan pengawasan BPD ini adalah, melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap masalah-masalah yang ditemui dilapangan untuk ditindak lanjuti, agar untuk masa yang akan datang tidak akan terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama pada objek yang sama.

Oleh karena itu, dalam hal pengawasan ini banyak cara yang dapat dilakukan oleh lembaga legislatif ini, sehingga pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya merasa tidak sendiri, namun ada lembaga lainnya yang berfungsi sesuai dengan peranannya masing—masing yang salah satunya adalah BPD yang akan mengawasi setiap kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Untuk lebih jelasnya lagi mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Sungai Ungar dapat dilihat dari tabel 5.9 dibawah ini:

Tabel 5.9 : Tanggapan Responden (BPD) Tentang Pengawasan di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

Indikator Pertanyaan	Persentase										Total	
	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak setuju			
	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%
Saya melakukan pengawasan, pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan lainnya	5	45,4	6	54,5	-	-	-	-	-	-	11	100%
Saya melakukan pengawasan keputusan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa	5	45,4	5	45,4	1	9,1	-	-	-	-	11	100%
Saya melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBDes	4	36,3	6	54,5	1	9,1	-	-	-	-	11	100%
Saya sring melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa	4	36,3	6	54,5	1	9,1	-	-	-	-	11	100%
Saya ikut bertanggung jawab terhadap laporan pertanggung jawaban dari	3	27,2	6	54,5	2	18,1	-	-	-	-	11	100%

Kepala Desa												
Jumlah	21	190,6	29	263,4	5	45,5	-	-	-	-	11	100%
Rata – rata	4,2	38,1	5,8	52,6	1	9,1	-	-	-	-	11	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2010

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dari tabel diatas dapat kita lihat jawaban responden tentang melakukan pengawasan, pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjawab sangat setuju sebanyak 5 orang (45,5%), dan yang menjawab setuju sebanyak 6 orang (54,5%).

Dan untuk jawaban responden tentang melakukan pengawasan keputusan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, sebanyak 5 orang (45,4%) menjawab sangat setuju, sebanyak 5 orang (45,4 %) menjawab setuju, dan sebanyak 1 orang (9,1%) responden menjawab netral.

Untuk jawaban responden tentang melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBDes, sebanyak 4 orang (36,3%) menjawab sangat setuju, sebanyak 6 orang (54,5 %) menjawab setuju, dan sebanyak 1 orang (9,1%) responden menjawab netral.

Kemudian untuk jawaban responden tentang BPD selalu melakukan evaluasi atau pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa, sebanyak 4 orang (36,3%) menjawab sangat setuju, sebanyak 6 orang (54,5%) menjawab setuju, dan sebanyak 1 orang (9,1%) responden menjawab netral.

Dan jawaban responden tentang ikut bertanggung jawab terhadap laporan pertanggungjawaban dari Kepala Desa, sebanyak 3 orang (27,2%) responden menjawab sangat setuju, sebanyak 6 orang (54,5%) menjawab setuju, dan sebanyak 2 orang (18,1%) menjawab netral.

Selanjutnya pada tabel 5.10 dapat dilihat tanggapan responden (masyarakat) mengenai fungsi pengawasan sebagai berikut :

Tabel 5.10 : Tanggapan Responden (Masyarakat) Tentang Pengawasan di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun

Indikator Pertanyaan	Persentase										Total	
	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak setuju			
	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%
Menurut saya BPD melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan perundang-undangan lainnya	-	-	18	18,5	9	9,2	49	50,5	21	21,6	97	100%
Menurut saya BPD melakukan pengawasan keputusan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa	-	-	11	11,3	19	19,5	49	50,5	18	18,5	97	100%
Menurut saya BPD melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBDes	-	-	12	12,3	18	18,5	53	54,6	14	14,4	97	100%
Menurut saya BPD melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa	-	-	13	13,4	14	14,4	55	56,7	15	15,4	97	100%

Saya mengetahui bahwa hasil pengawasan BPD dilaporkan kepada masyarakat	-	-	13	13,4	13	13,4	56	57,7	15	15,4	97	100%
Jumlah	-	-	67	56,9	73	75	262	270	83	85,3	97	100%
Rata – rata	-	-	13,4	13,3	14,6	15	52,4	54	16,6	17,1	97	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2010

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Dari tabel diatas dapat kita lihat jawaban responden tentang BPD telah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Desa, yang menjawab setuju sebanyak 18 orang (18,5%), yang menjawab netral sebanyak 9 orang (9,2%), tidak setuju sebanyak 49 orang (50,5%), dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 21 orang (21,6%).

Dan jawaban responden tentang BPD melakukan pengawasan dari Keputusan Desa, sebanyak 11 orang (11,3%) responden menjawab setuju, sebanyak 19 orang (19,5%) menjawab netral, dan sebanyak 49 orang (50,5%) menjawab tidak setuju, dan sebanyak 18 orang (18,5%) menjawab sangat tidak setuju.

Dan untuk jawaban responden tentang melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBDes, sebanyak 12 orang (12,3%) menjawab sangat setuju, sebanyak 18 orang (18,5 %) menjawab setuju, sebanyak 53 orang (54,6%) responden menjawab tidak setuju, sebanyak 14 orang (14,4%) menjawab sangat tidak setuju.

Untuk jawaban responden tentang melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan, sebanyak 13 orang (13,4%) menjawab setuju, sebanyak 14 orang

(14,4%) menjawab netral, sebanyak 55 orang (56,7%) responden menjawab tidak setuju, dan sebanyak 15 orang (15,4%) responden menjawab sangat tidak setuju..

Kemudian untuk jawaban responden tentang hasil pengawasan BPD dilaporkan kepada masyarakat, sebanyak 13 orang (13,4%) menjawab setuju, sebanyak 13 orang (13,4%) menjawab netral, sebanyak 56 orang (57,7%) menjawab tidak setuju, dan sebanyak 15 orang (15,4%) menjawab sangat tidak setuju.

5.2.4 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi berwenang. Dalam fungsinya ini Badan Permusyawaratan Desa harus mengetahui dan menampung apa saja yang diterima masyarakat baik itu ide atau gagasan didalam pelaksanaan pembangunan ataupun dalam tahap perencanaan pembangunan.

Menurut Mukhtar mas'oed dalam Rauf dan Zulfan (2004 : 39), bahwa kepentingan rakyat, kebutuhan, keinginan, nilai-nilai dan harapan mereka bisa dipenuhi tetapi juga bis dikecewakan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Warga Negara sangat memperhatikan dan berkepentingan dengan keputusan yang dibuat pemerintah. Mereka menyatakan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.

Pendapat diatas memberikan gambaran bahwa keinginan masyarakat khususnya masyarakat desa untuk memberikan aspirasinya kepada BPD maupun pemerintah desa adalah agar keinginan-keinginan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah desa dapat lebih sesuai dan diperhatikan oleh pemerintah, sehingga desa baik melalui individu, atau kelompok-kelompoknya akan menyampaikan aspirasi dan kepentingannya kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun kepada pemerintah desa sebagai unsur pemerintahan desa.

Konsekuensi pelaksanaan yang mengidentifikasi fungsinya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkembang ditengah masyarakat atau yang terjadi dilapangan untuk menampung dan menyalurkan, setelah anggota BPD mengetahui kondisi objektif yang dialami masyarakat secara kongkrit melalui musyawarah. Jadi anggota BPD Sungai Ungar telah mengadakan tugasnya menyalurkan aspirasi masyarakat atau fungsi lainnya sebagaimana layaknya lembaga perwakilan masyarakat desa, hanya saja dalam realisasinya belum optimal dan konsekuensinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat desa Sungai Ungar.

Untuk lebih jelasnya lagi mengenai fungsi penampung aspirasi masyarakat oleh BPD di Desa Sungai Ungar dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5.11 : Tanggapan Responden (BPD) Tentang Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

Indikator Pertanyaan	Persentase										Total	
	Sangat Setuju				Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak setuju			
	Org	Org	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%
Saya menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi dengan baik	5	97	5	45,4	1	9,1	-	-	-	-	11	100%
Saya sering pendapat masukan atau aspirasi dari masyarakat dalam hal pembangunan desa	5	97	5	45,4	1	9,1	-	-	-	-	11	100%
Aspirasi yang diterima disampaikan masyarakat secara tertulis maupun lisan	5	97	5	45,4	1	9,1	-	-	-	-	11	100%
Saya selalu menanggapi masukan atau aspirasi dari masyarakat	5	97	6	54,5	-	-	-	-	-	-	11	100%
Saya selalu turun langsung kemasyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat	5	97	6	54,5	-	-	-	-	-	-	11	100%
Jumlah	25	97	27	245,2	3	27,3	-	-	-	-	11	100%
Rata – rata	5	45,5	5,4	49	0,6	5,4	-	-	-	-	11	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2010

SS = Sangat Setuju
S = Setuju
N = Netral

TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

Dari tabel diatas dapat kita lihat jawaban responden tentang menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik, yang menjawab sangat setuju sebanyak 5 orang (45,4%), yang menjawab setuju sebanyak 5 orang (45,4%), dan yang menjawab netral sebanyak 1 orang (9,1%).

Dan untuk jawaban responden tentang sering mendapat masukan atau aspirasi dari masyarakat dalam hal pembangunan desa, sebanyak 5 orang (45,4%), menjawab sangat setuju, sebanyak 5 orang (45,4%), menjawab setuju, dan sebanyak 1 orang (9,1%) responden menjawab netral.

Untuk jawaban responden tentang asprasi yang diterima anggota BPD disampaikan masyarakat secara tertulis maupun lisan, sebanyak 5 orang (45,4%) sebanyak 5 orang (45,4%), menjawab setuju, dan sebanyak 1 orang (9,1 %) menjawab netral.

Kemudian untuk jawaban responden tentang BPD selalu menanggapi aspirasi atau masukan dari masyarakat, sebanyak 5 orang (45,4%) menjawab sangat setuju, dan sebanyak 6 orang (54,5%) menjawab setuju.

Dan jawaban responden tentang BPD selalu turun langsung dalam menampung aspirasi masyarakat, sebanyak 5 orang (45,4%) menjawab sangat setuju, sebanyak 6 orang (54,5%) menjawab setuju.

Tabel 5.12 : Tanggapan Responden (Masyarakat) Tentang Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

Indikator Pertanyaan	Persentase										Total	
	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak setuju			
	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%
Menurut saya BPD selalu mendapat masukan atau aspirasi dari masyarakat dalam hal pembangunan desa	18	18,5	36	37,1	10	10,3	31	31,9	2	2,1	97	100%
Aspirasi yang disampaikan masyarakat secara tertulis maupun lisan	-	-	31	31,9	23	23,7	32	32,9	11	11,3	97	100%
Menurut saya BPD selalu menanggapi dengan baik aspirasi dari masyarakat	-	-	10	10,3	15	15,4	63	64,9	9	9,2	97	100%
Menurut saya BPD turun langsung kemasyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat	-	-	6	6,1	17	12,3	56	57,7	18	18,5	97	100%
Menurut saya BPD menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat langsung kepada pejabat atau instansi berwenang	-	-	9	9,2	18	18,5	62	63,9	8	8,2	97	100%
Jumlah	18	18, 5	92	94,6	83	17,1	244	251, 3	48	49,3	97	100%
Rata-rata	3,6	3,7	18,4	18,9	16,6	85,4	48,8	50,2	9,6	9,8	97	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2010

SS = Sangat Setuju
S = Setuju
N = Netral

TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

Dari tabel diatas dapat kita lihat jawaban responden tentang BPD selalu mendapat masukan atau aspirasi dari masyarakat dalam hal pembangunan desa, yang menjawab sangat setuju sebanyak 18 orang (18,5%), yang menjawab setuju sebanyak 36 orang (37,1%), yang menjawab netral sebanyak 10 orang (10,3%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 31 orang (31,9%), dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (2,1%).

Dan untuk jawaban responden tentang aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada anggota BPD bisa secara tertulis maupun lisan, sebanyak 31 orang (31,9%) menjawab setuju, sebanyak 23 orang (23,7 %) menjawab netral, sebanyak 32 orang (32,9%) responden menjawab tidak setuju, dan sebanyak 11 orang (11,3%) menjawab sangat tidak setuju.

Untuk jawaban responden tentang asprasi yang disampaikan baik yang turun dari masyarakat selalu mendapat tanggapan yang baik dari BPD, sebanyak 10 orang (10,3%) menjawab setuju, sebanyak 15 orang (15,4%) menjawab netral, sebanyak 63 orang (64,9%) menjawab tidak setuju, dan sebanyak 9 orang (9,2%) menjawab sangat tidak setuju.

Kemudian untuk jawaban responden tentang BPD langsung turun kemasyarakat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, sebanyak 6 orang (6,1%) menjawab setuju, sebanyak 17 orang (17,5%) menjawab netral, sebanyak 56 orang

(57,7%) menjawab tidak setuju, dan sebanyak 18 orang (18,5%) responden menjawab sangat tidak setuju.

Dan jawaban responden tentang BPD menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat langsung kepada pejabat atau instansi yang berwenang, sebanyak 9 orang (9,2%) menjawab setuju, sebanyak 18 orang (18,5%) menjawab netral, sebanyak 62 orang (63,9%) responden menjawab tidak setuju, dan sebanyak 8 orang (8,2%) responden menjawab sangat tidak setuju.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun dapat diketahui melalui rekapitulasi yang penulis dapatkan melalui jawaban responden dibawah ini :

Tabel 5.13 : Rekapitulasi Tanggapan Responden (BPD) dari Hasil Angket Tentang Fungsi BPD di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

Variabel Penelitian	Persentase										Total	
	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak setuju			
	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%
Mengayomi	4,4	39,9	4,2	38,1	2,2	19,9	0,2	1,8	-	-	11	100%
Legislasi	3,6	32,6	6	54,5	1,4	12,6	-	-	-	-	11	100%
Pengawasan	4,2	38,1	5,8	52,6	1	45,4	-	-	-	-	11	100%
Menyalur Aspirasi	5	45,4	5,4	49	0,6	5,4	-	-	-	-	11	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2010

Tabel 5.14 : Rekapitulasi Tanggapan Responden (Masyarakat) dari Hasil Angket Tentang Fungsi BPD di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun

Variabel Penelitian	Persentase										Total	
	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak setuju			
	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%
Mengavomi	-	-	10,6	10,8	16,8	17,2	49,2	50,6	20,4	20,9	97	100%

Legislasi	-	-	10,8	11,1	12	12,3	58	59,7	16,2	16,6	97	100%
Pengawasan	-	-	13,4	13,3	14,6	15	52,4	54	16,6	17,1	97	100%
Menyalur Aspirasi	3,6	3,7	18,4	18,9	16,6	17,1	48,8	50,2	9,6	9,8	97	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2010

Dari rekapitulasi hasil angket penelitian mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sungai Ungar diatas dilihat bahwa :

1. Mengayomi. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa mengayomi berdasarkan tanggapan responden anggota BPD sudah berjalan baik, yang terlihat dari jawaban responden terbanyak 22 atau (39,9%). Sedangkan tanggapan responden dari masyarakat mengayomi kurang berjalan baik, yang dilihat dari jawaban responden terbanyak 246 atau (50,6%).

Berdasarkan kedua tanggapan responden diatas (BPD dan masyarakat) maka dapat diketahui bahwa mengayomi kurang berjalan dengan baik yang terlihat dengan jumlah rata-rata responden terbanyak 50,6%, karena BPD belum dapat membina lembaga adat, dan menjalankan tugasnya dalam mengayomi ini belum terlihat serta BPD juga belum dapat memeberikan kontribusi atau anggaran yang baik dalam penyelenggaraan adat istiadat.

2. Legislasi. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa legislasi berdasarkan tanggapan responden anggota BPD sudah berjalan baik, yang terlihat dari jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 30 atau (54,5%). Sedangkan tanggapan responden dari masyarakat legislagi belum berjalan baik, yang dilihat dari jawaban responden terbanyak 290 atau (59,7%).

Berdasarkan kedua tanggapan responden diatas (BPD dan masyarakat) maka dapat diketahui bahwa legislasi kurang berjalan dengan baik yang terlihat dengan jumlah rata-rata responden terbanyak 59,7%, berdasarkan penuturan dari pada Kepala Desa Sungai Ungar yang mana, telah ada peraturan desa yang dibuat namun belum dapat direalisasikan karena belum dapat payung hukumnya dari pada pemerintah daerah.

3. Pengawasan. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pengawasan berdasarkan tanggapan responden anggota BPD sudah berjalan baik, yang terlihat dari jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 29 atau (52,6%). Sedangkan tanggapan responden dari masyarakat legislasi belum berjalan baik, yang dilihat dari jawaban responden terbanyak 262 atau (54%).

Berdasarkan kedua tanggapan responden diatas (BPD dan masyarakat) maka dapat diketahui bahwa pengawasan kurang berjalan dengan baik yang terlihat dengan jumlah rata-rata responden terbanyak 54% dengan alasan BPD kurang berfungsi dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan dan pembangunan desa.

4. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa menampung dan menyalurkan berdasarkan tanggapan responden anggota BPD sudah berjalan baik, yang terlihat dari jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 27 atau (49%). Sedangkan tanggapan responden dari masyarakat menampung dan menyalurkan aspirasi ini belum berjalan baik, yang dilihat dari jawaban responden terbanyak 234 atau (50,2%).

Berdasarkan kedua tanggapan responden diatas (BPD dan masyarakat) maka dapat diketahui bahwa menampung kurang berjalan dengan baik yang terlihat dengan jumlah rata-rata responden terbanyak 50,2%, karena setiap masyarakat menyalurkan aspirasi, anggota BPD kurang menanggapinya.

Jadi akumulasi keseluruhan (BPD) yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 86 (156,1%), yang menjawab setuju sebanyak 107 (194,2%), kemudian yang menjawab netral sebanyak 26 (47%), dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 (1,8%). Sedangkan akumulasi keseluruhan (masyarakat) yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 18 (3,7%), yang menjawab setuju sebanyak 92 (18,2%), kemudian yang menjawab netral sebanyak 78 (16,1%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 234 (150,2%), dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 48 (9,8%).

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas terlihat bahwa fungsi yang dijalankan BPD meliputi mengayomi, legislasi, pengawasan dan penyalur aspirasi di Sungai Ungar tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

5.3 Hambatan-hambatan didalam Menjalankan Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

Adapun Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sungai Ungar belum berjalan secara maksimal seperti apa yang diharapkan, maka penulis menguraikan dan menganalisa

temuan—temuan dan hambatan-hambatan yang penulis dapatkan dilapangan antara lain :

5.3.1 Faktor Intern yang mana terdapat pada BPD antara lain:

1. Kurangnya Koordinasi

Koordinasi merupakan menyesuaikan diri dari bagian-bagian satu sama serta pekerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil yang keseluruhan. Koordinasi sangat penting dilakukan oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa, namun pada kenyataannya dilapangan anggota BPD mempertahankan ide dan gagasan berdasarkan kepentingan masing-masing. Dan selain itu anggota Badan Permusyawaratan Desa ini di sibukkan oleh aktivitasnya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD yaitu Bapak Muhamad Hafidl Zawawi .mengatakan :

“ Anggota BPD kepadatan jadwal kerja Pegawai dan tugasnya masing-masing, sehingga kurang koordinasi yang maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota BPD.”

Tidak hanya koordinasi yang memungkinkan komunikasi menjadikan kefakuman dalam berinteraksi. Yang terpenting adalah komitmen dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan dari masyarakat desa kurang diterapkan dalam diri masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa dan mereka lebih mendahulukan kepentingan sendiri.

Oleh karena itu, hendaknya ada kerja sama yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Namun Badan Permusyawaratan Desa menunjukkan kondisi serba kekurangan baik infrastruktur maupun pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusianya, demikian juga dengan kondisi Pemerintahan Desa.

2. Kurangnya Pendapatan (Gaji)

Pada dasarnya motivasi sangat diperlukan bagi organisasi yang baru berkembang, yang mana terdapat point-point penting didalam melakukan motivasi terhadap anggota, yang penulis ketahui bahwasanya pada Badan Permusyawaratan Desa Sungai Ungar sangat minim penghasilannya. Dengan ini maka muncul kurang termotivasi anggota BPD dalam menjalankan tugasnya untuk berpartisipasi kedalam Pemerintahan Desa Sungai Ungar.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana.

Tidak ada suatu organisasi yang hidup tanpa ada sumber dana. Merupakan maupun bukan, harus dihadapkan pada keterbatasan dana. Berdasarkan hasil wawancara salah satu anggota BPD Bapak M. Rusli BPD di Desa Sungai Ungar bahwa :

“BPD memiliki keterbatasan dan untuk bergerak melaksanakan tugas dan fungsinya. Dana yang diperoleh dari Pemda Kabupaten Karimun yang setiap tahunnya diberikan tidak mencukupi. Demikian juga minim perlengkapan didalamnya.”

5.3.2 Faktor Ekstern yang berasal dari luar lingkungan BPD

BPD di Desa Sungai Ungar seringkali mengalami permasalahan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga permasalahan-permasalahan lain dalam menjalankan fungsinya didalam masyarakat, sebahagian masyarakat berasumsi karena sudah menjadi tugas dan fungsi anggota BPD sendiri sebagai wakil masyarakat di Desa Sungai Ungar untuk mendekati mereka dan mencermati setiap aspirasi yang berkembang di Desa Sungai Ungar apalagi jika sampai pada tuntutan penyaluran aspirasi melalui rapat atau musyawarah.

1. Kurangnya partisipasi masyarakat di Desa Sungai Ungar ini terlihat dengan tidak antusiasnya masyarakat untuk hadir dan aktif dalam menyampaikan ide-ide atau gagasan dan pendapatnya dalam kegiatan rapat desa. Hal ini disebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa pentingnya rapat dalam rangka menampung aspirasi masyarakat Desa sungai Ungar.
2. Tidak berhasil BPD menjalankan fungsi karena masyarakat Desa Sungai Ungar tidak memiliki pengetahuan yang konkret dan tepat tentang hal-hal apa saja sebenarnya yang layak untuk disalurkan kepada pemerintah desa serta kepada siapa aspirasi harus disalurkan sehingga masyarakat tidak menyalurkan langsung aspirasinya.
3. Anggota BPD jarang mengikuti mengadakan sherring informasi dengan BPD yang mana memang telah ada program yang dibuat oleh Kepala Desa berupa

pertemuan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan di tubuh pemerintahan desa.

BAB VI

PENUTUP

6. 1 Kesimpulan

Sehubungan dengan sasaran yang hendak dicapai melalui penelitian ini, maka berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dan juga saran-saran sebagai sumbangan pemikiran penulis yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja BPD sebagai mitra Kepala Desa terutama dalam meningkatkan kinerja BPD sebagai lembaga aspiratif bagi masyarakat melalui fungsi BPD sebagai berikut :

1. Mengayomi. Fungsi mengayomi adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa Sungai Ungar dimaksudkan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan, membina lembaga adat, dan mempertahankan keberadaan suku-suku yang ada dalam masyarakat.
2. Legislasi. Yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan dan peraturan desa bersama-sama Pemerintah Desa, rancangan peraturan desa tentang PAD, dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa.
3. Pengawasan. Yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, APBDes, serta keputusan Kepala Desa.
4. Menampung aspirasi masyarakat. Yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Berdasarkan analisa dan tujuan mengenai implementasi pelaksanaan fungsi BPD dalam pelaksanaan program pemerintahan desa, maka sebagai tahap akhir dari kegiatan penulisan ini maka penulis memberikan kesimpulan.

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun maka secara keseluruhan pelaksanaan fungsi BPD berada dalam kategori kurang baik karena dari 4 (empat) indikator yang ada, tanggapan responden adalah tidak setuju atau kurang baik.
2. Di dalam menjalankan fungsi antara BPD dan Kepala Desa kurang bekerjasama atau berkoordinasi terutama dalam membahas dan menetapkan peraturan desa padahal keduanya merupakan mitra dalam pemerintahan desa.
3. BPD terkesan pasif dalam menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah padahal BPD sebagai lembaga demokrasi di Desa mempunyai tugas untuk mensejahterakan masyarakat salah satunya adalah dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi mereka pihak berwenang.
4. Kurangnya kesadaran dari anggota BPD bahwa mereka adalah wakil dari masyarakat di level desa yang dipilih langsung untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

6.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis memberikan saran-saran sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai organisasi perwakilan masyarakat desa supaya lebih menjalankan pengetahuan, wawasan, kemampuan, keterampilan serta selalu memanfaatkan sumber daya yang ada demi kepentingan dan kepuasan masyarakat karena BPD adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat di daerahnya.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) walaupun secara struktural terpisah dari Kepala Desa tetapi instansi ini tetaplah mitra sejajar dan harus saling membantu, mengontrol, atau saling mengawasi dan menjalin hubungan yang harmonis dengan selalu mengadakan koordinasi terutama dalam membahas dan menetapkan peraturan desa.
3. Agar pelaksanaan fungsi berjalan dengan baik, maka harus didukung oleh dana, sarana dan prasarana yang memadai. Maka diharapkan pemerintah desa dapat membantu sarana dan prasarana penunjang bagi BPD. Dapat juga dilakukan meminta bantuan kepada Pemerintah terkait dalam mencukupi sarana prasarana yang masih kurang tersebut.
4. Agar masyarakat mengerti dan mengetahui kemana tempat penyaluran aspirasi masyarakat desa tersebut, hendaknya pemerintah desa dan BPD mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tempat penyaluran aspirasi masyarakat desa dalam pemerintah desa ditujukan kepada BPD selaku legislatif kecil yang ada di Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Acyadi dan Cholid Nurboko, 2001. *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT. Bumi Aksara
- Ad, As Moch, 2000. *Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Liberty.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Moekijat, 1991. *Administrasi Kepegawaian Negara*, Bandung: Mandar Maju.
- Purwadarminta, WJS, 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta
- Sanapiah, Faisal, 1995. *Format-format Penelitian Sosial : Dasar-dasar Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sembiring Sentosa, 2006. *Himpunan Lengkap Undang-undang Tentang Pemerintah Daerah*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Siagian, Sondang P, 1995. *Manajemen Strategi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Purwadarminta, WJS, 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Widjaja, HAW. Drs, Prof, 2004. *Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. Drs, Prof, 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. Drs, Prof, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zulfan, Heri dkk, 2003. *Parlemen Desa, Membangun Demokrasi Dari Bawah*, Pekanbaru: UNRI Press.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004, *tentang Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa Aulia
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.13 tahun 2007 *tentang Badan Permusyawaratan Desa*.
- Internet (WWW. Google. Com

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Populasi dan Sampel	29
Tabel 4.1	Keadaan Penduduk Desa Sungai Ungar Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2010.....	38
Tabel 4.2	Keadaan Jumlah Penduduk Desa Sungai Ungar Menurut Tingkat Umur Pada tahun 2010.....	35
Tabel 4.3	Keadaan Jumlah Penduduk Desa Sungai Ungar Berdasarkan Mata Pencarian Pada tahun 2010	36
Tabel 4.4	Keadaan Jumlah Penduduk Desa Sungai Ungar Berdasarkan Agama Pada tahun 2010.....	37
Tabel 4.5	Keadaan Jumlah Penduduk Desa Sungai Ungar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada tahun 2010.....	38
Tabel 4.6	Sarana Pendidikan Di Desa Sungai Ungar Tahun 2010	39
Tabel 4.7	Sarana Ibadah di Desa Sungai Ungar Tahun 2010	40
Tabel 4.8	Sarana Ibadah di Desa Sungai Ungar Tahun 2010	41
Tabel 5.1	Keadaan responden Berdasarkan Umur	55
Tabel 5.2	Keadaan responden Berdasarkan Umur	56
Tabel 5.3	Keadaan responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	56
Tabel 5.4	Keadaan responden Berdasarkan Umur	57
Tabel 5.5	Tanggapan Responden (BPD) Tentang Mengayomi Adat Istiadat di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun.....	61
Tabel 5.6	Tanggapan Responden (Masyarakat) Tentang Mengayomi Adat Istiadat di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun.....	64
Tabel 5.7	Tanggapan Responden (BPD) Tentang Legislasi di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun	68
Tabel 5.8	Tanggapan Responden (Masyarakat) Tentang Legislasi di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun	70
Tabel 5.9	Tanggapan Responden (BPD) Tentang Pengawasan di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun	74

Tabel 5.10	Tanggapan Responden (Masyarakat) Tentang Pengawasan di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun	76
Tabel 5.11	Tanggapan Responden (BPD) Tentang Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Sungai Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun	80
Tabel 5.12	Tanggapan Responden (Masyarakat) Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Sungai Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun	82
Tabel 5.13	Rekapitulasi Tanggapan Responden (BPD) dari Hasil Angket Tentang Fungsi BPD di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karmun	84
Tabel 5.14	Rekapitulasi Tanggapan Responden (Masyarakat) dari Hasil Angket Tentang Fungsi BPD di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kunder Kabupaten Karmun	84